

## ABSTRAK

Pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas dengan sistem *Online Single Submission* sebagai salah satu kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang mewakili pemerintah memiliki peran yang sangat penting berdasarkan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas oleh karena itu, penulis menganggap adanya suatu permasalahan tentang sejauh mana kewenangan notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) dalam sistem *Online Single Submission (OSS)*, hambatan dan solusi yang terjadi dalam menggunakan sistem online single submission (OSS) di kota pekalongan?

Sehingga ditarik tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) dalam sistem *Online Single Submission (OSS)*, Untuk menyelesaikan hambatan dan solusinya dalam kewenangan notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) dalam sistem *Online Single Submission (OSS)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis, yang menganalisis permasalahan menggunakan teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan.

Berdasarkan Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa di dalam pendirian Perseroan Terbatas kewenangan notaris yang sesungguhnya harus dilakukan sebelum pendirian akan tetapi, kewenangan notaris yang sesungguhnya harus dilakukan sebelum, selama dan sesudah perseroan terbatas itu berdiri. Mekanisme untuk mendirikan usaha pada sistem *Online Single Submission (OSS)* Untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) langkah pertama untuk bisa mengajukan izin usaha melalui OSS adalah membuat akta pendirian PT sekaligus mendapatkan SK pengesahan. Nomor akta dan nomor SK pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem OSS. Proses mengisi nomor akta dan SK hanya dilakukan bila data PT dari AHU belum terkoneksi. Hal ini mungkin terjadi mengingat saat ini proses migrasi data dari Dirjen AHU ke OSS masih berlangsung. Apabila proses migrasi sudah 100% selesai, maka memasukkan secara manual tidak perlu lagi dilakukan.

**Kata Kunci:** Kewenangan Notaris, Perseroan Terbatas, *Online Single Submission (OSS)*

## **ABSTRACT**

*Implementation of the establishment of a Limited Liability Company with the Online Single Submission system as one of the authorities of the Notary Public General who represents the government has a very important role based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, therefore, the authors consider a problem about the extent of the notary authority in the establishment of Limited Liability Companies (PT) in the Online Single Submission (OSS) system, obstacles and solutions that occur in using the online single submission system (OSS) in the city of Pekalongan? So that the goal is drawn To find out and analyze the authority of a Notary Public in establishing a Limited Liability Company (PT) in the Online Single Submission (OSS) system, To resolve obstacles and solutions in the authority of a notary public in establishing a Limited Liability Company (PT) in the Online Single Submission (OSS) system. used in this research is sociological juridical research, the specifications used in this study are descriptive analysis research, which analyzes the problem using legal certainty theory and expediency theory.*

*Based on the results of the study it can be concluded that in the establishment of a Limited Liability Company the real notary authority must be exercised before the establishment but the real notary authority must be exercised before, during and after the limited liability company is established. The mechanism for establishing a business in the Online Single Submission (OSS) system for a company in the form of a Limited Liability Company (PT) The first step to be able to apply for a business license through OSS is to make a deed of establishment of the PT as well as obtain a legalization decree. The deed number and decree number issued by the Directorate General of General Law Administration (AHU) of the Ministry of Law and Human Rights will be included in the OSS system. The process of filling in the deed and SK number is only done if the PT data from AHU has not been connected. This might happen considering that currently the process of migrating data from the Director General of AHU to OSS is still ongoing. If the migration process is 100% complete, then manually entering is no longer necessary.*

**Keywords:** *Notary Authority, Limited Liability Company, Online Single Submission (OSS)*